

BAB V

KESIMPULAN

Pergerakan China yang cenderung agresif di wilayah Laut China Selatan, seperti mereklamasi karang-karang yang ada di Kepulauan Spratly, mengerahkan kapal Coast Guard dan beberapa kapal perangnya membuat negara yang bersinggungan langsung terutama Filipina menjadi geram. Namun, kekuatan ekonomi dan militer yang dapat dikatakan lemah membuat Filipina seringkali tidak bisa berbuat apa-apa dalam merespon pergerakan China tersebut, terutama di wilayah karang-karang terluar yang masih berada di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

Filipina yang posisinya kian tahun terdesak oleh pergerakan China di Laut China Selatan mau tidak mau harus melakukan sebuah strategi demi bisa bertahan dalam bertahan di konflik Laut China Selatan ini. Setelah menganalisa strategi yang bisa dipakai Filipina dengan Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat) dapat disimpulkan bahwa Strategi yang paling rasional dengan keadaan Filipina saat ini dalam menghadapi China adalah dengan strategi diplomasi dan penguatan militer internal.

Dalam menghadapi China di konflik Laut China Selatan, Filipina memakai strategi diplomasi, yaitu dengan membawa kasus ini ke Pengadilan Internasional (*Permanent Court of Arbitration*). Dengan berdasarkan UNCLOS, Filipina menggugat klaim China yang disebut *nine-dash Line* yang memakan hampir 80% luas wilayah Laut China Selatan yang juga menyanggol wilayah territorial negara-

negara lainnya termasuk Filipina. Meskipun China sedari awal akan menolak segala keputusan pengadilan ini, namun pengadilan ini terus berlangsung, hingga bulan Juli 2016 lalu Pengadilan Arbitrasi memutuskan bahwa klaim *nine-dash line* yang selama ini menjadi patokan China di Laut China Selatan dinyatakan tidak sah, dan reklamasi yang dilakukan oleh China dianggap illegal. Hal ini disambut suka cita oleh negara-negara yang bersinggungan langsung dengan LCS terutama Filipina. Selain itu, sebagai anggota ASEAN, Filipina juga tidak henti-hentinya menyerukan agar dibentuknya sebuah peraturan yang mengikat, agar penyelesaian konflik ini menjadi lebih jelas di masa mendatang jika terjadi sengketa antar anggota komunitas ASEAN. Meskipun hingga saat ini tujuan tersebut belum terwujud.

Tidak hanya dengan cara diplomasi, Filipina juga menggunakan strategi penguatan militer. Hal ini dilakukan guna tercapainya kemandirian dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Dalam bidang militer ini, Filipina bisa dikatakan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat lemah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, Langkah pertama dalam menutupi kekurangan militernya adalah dengan meningkatkan kekuatan militer pertahanan Filipina. Dilihat dari alutsista-alutsista yang ada di inventori Angkatan Bersenjata Filipina, hampir sebagian besar dari peralatan tersebut sudah sangat tua, seperti kapal-kapal perang utama masih banyak yang berasal dari bekas perang dunia kedua, dan angkatan udaranya yang tidak memiliki pesawat tempur supersonic lagi setelah pesawat terakhir dipensiunkan pada tahun 2005, dilanjutkan dengan Angkatan Darat Filipina yang masih banyak mengandalkan kendaraan angkut tua dan helicopter angkut bekas perang Vietnam.

Melihat banyak kekurangan alutsista militer Filipina tersebut membuat China dengan leluasa bisa mereklamasi karang-karang yang ada di Kepulauan Spratly.

Demi tercapainya kemampuan militer pertahanan yang mumpuni dalam menghadapi senggolan China tersebut, Filipina mau tidak mau belanja alutsista-alutsista yang harganya tidak sedikit, dan mau tidak mau Filipina harus meningkatkan Anggaran Militernya tiap tahun. Hal ini sudah dilakukan Filipina semenjak tahun 2010 Filipina terus menggenjot anggaran belanja militernya.

Dengan meningkatnya anggaran militer tersebut, Filipina bisa belanja peralatan militer yang terbaru. Saat ini kontrak-kontrak pembelian peralatan militer yang sudah ditandatangani dan diterima adalah sebagai berikut:

- Di matra Laut, Filipina telah mengakuisisi dua Frigate Kelas Gregorio del Pilar yang dibeli dari Amerika Serikat. Setelah itu, Filipina juga membeli kapal perang berjenis *Strategic Sealift Vessel* (SSV) dari PT. PAL Indonesia. Dan yang terakhir adalah tambahan lima kapal berjenis *Landing Craft Heavy* (LCH) yang sebagiannya berasal dari hibah Australia. Tak ketinggalan juga tambahan 10 Kapal Coast Guard dari Jepang yang akan memperkuat patroli territorial di Laut China Selatan salah satunya.
- Di Matra Udara, Filipina mengakuisisi 12 pesawat tempur supersonic FA-50 Golden Eagle dari Korea Selatan. Ini merupakan angin segar bagi Angkatan Udara Filipina yang sebelumnya tidak memiliki pesawat tempur supersonik semenjak tahun 2005. Selain mengakuisisi pesawat tempur, Filipina juga

mengakuisisi pesawat angkut sedang C-295 dari Airbus, dan pesawat angkut ringan dari PT Dirgantara Indonesia.

- Di Matra Darat juga tidak ketinggalan, Filipina mengakuisisi kendaraan *Armed Personnel carriers* (APC) M113A2 dari Amerika Serikat sebanyak 114 unit untuk Angkatan Darat Filipina. Kendaraan ini nantinya akan menjadi kendaraan angkut personel lapis baja di daerah konflik.

Memang jika dibandingkan secara langsung dengan kekuatan militer China, kekuatan militer Filipina masih sangat jauh dibawah China. Namun peningkatan kapabilitas militer Filipina ini cukup dapat diapresiasi dikarenakan Filipina sudah merencanakan pembangunan militernya agar dapat mandiri dalam hal pertahanan nasional. Dan tidak selalu bergantung dengan negara-negara lain.

Strategi militer yang kedua yang dilakukan Filipina adalah dengan membentuk kerjasama militer dengan negara lain. Filipina menyadari jika sewaktu-waktu konflik Laut China Selatan dengan China terjadi eskalasi bahkan hingga perang, maka dapat dipastikan Filipina akan menderita kekalahan. Hal ini dikarenakan kekuatan militer Filipina yang masih minim dan sangat jauh di bawah China. Sedangkan proses modernisasi pertahanan sendiri biasanya memakan waktu rata-rata tahunan bahkan 10 tahunan. Oleh Karena itu, kerjasama militer dan aliansi ini menjadi penting bagi Filipina guna bisa mengimbangi kekuatan China.

Kerjasama militer yang pertama datang dari Amerika Serikat. Pada tahun 2014 Filipina dan Amerika Sepakat menandatangani *The Enhanced Defence Cooperation Agreement* (EDCA). Perjanjian ini memungkinkan Amerika Serikat

untuk mendeploy Pasukan, pesawat tempur, dan kapal-kapal perang di pangkalan-pangkalan militer yang disepakati bersama di wilayah Filipina.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pilihan strategi yang paling rasional bagi Filipina adalah dengan mengkombinasikan kekuatan (Strenght) yaitu mengoptimalkan pengadilan arbitrase yang dimenangkan oleh Filipina Juli 2016 yang lalu di Den Haag Belanda, dengan Kesempatan (opportunity) yang datang, yaitu mengoptimalkan tawaran kerjasama pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat dan Jepang guna mengimbangi kekuatan China di kawasan Laut China Selatan. Selain itu, penguatan militer juga diperlukan agar Filipina bisa menutupi kelemahan (weakness) militernya dan mempertahankan kepentingan nasionalnya secara mandiri, meskipun tidak murah. Dengan perencanaan yang tepat dan berjangka panjang meskipun dengan anggaran yang terbatas, diharapkan Filipina mampu mengoptimalkan kekuatan pertahanan militernya untuk mengatasi segala ancaman (Threats) di masa mendatang.